

DEKLARASI ORANG MUDA TUNTUT SOLUSI PENDIDIHAN BUMI AKIBAT KRISIS IKLIM



PENDAHULUAN

Krisis iklim semakin kesini semakin parah dan tak terkendali menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil sehingga Indonesia menjadi negara yang paling berdampak terhadap krisis iklim. Laju produksi emisi karbon di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula secara global dan diprediksi akan terus naik jika tidak ada penanganan serius (*business as usual*). Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara penghasil emisi karbon pada tahun 2021 (729 juta ton) dan 2023 (704 juta ton). Alih fungsi lahan dan deforestasi hutan serta ketergantungan terhadap batubara pada sektor ketenagalistrikan (ada 253 PLTU seluruh Indonesia) menjadi penyumbang utama emisi karbon di Indonesia.

Kenaikan suhu global bumi telah memunculkan dampak ekstrim terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Pada Juni 2024, gelombang panas menunjukkan kenaikan suhu global bumi tercatat 1,5¹ derajat Celcius telah mengakibatkan kematian di Thailand (66 orang)² dan India (33 orang)³. Hal ini menunjukkan gagalnya kesepakatan Paris Agreement untuk menekan suhu global bumi dibawah 1,5 derajat Celcius. Begitu pula dengan Conference of Parties (COP) yang dihadiri

¹ https://wmo-int.translate.google.com/media/news/record-temperature-streak-continues-june?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240510191743-4-537169/neraka-bocor-di-negara-tetangga-ri-61-orang-meninggal>

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240601195418-4-543052/33-warga-india-meninggal-terpanggang-cuaca-panas-bak-neraka>

oleh 154 negara sejak 1995 hingga saat ini, COP 29, belum mampu mencegah laju emisi karbon. Dampaknya telah mengakibatkan rusak/matinya terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan tenggelamnya pulau kecil dan pesisir, gagal panen petani, banjir rob, hingga sulitnya akses nelayan lokal dalam mencari ikan hingga tersingkirnya masyarakat adat di pesisir. Perubahan ini pun terus diperparah oleh berbagai macam program dan kebijakan negara yang semakin memperburuk krisis iklim yang berakumulasi pada terus menerus terjadinya bencana ekologis (banjir, banjir rob, tanah longsor, kekeringan)

Kerusakan lingkungan akibat krisis iklim terpampang nyata di pesisir utara Jawa Tengah dimana laut menjorok ke daratan menghabisi sawah, melenyapkan tambak, menggusur pemukiman, menyebabkan banyak tanah musnah, menyiksa kehidupan warga pesisir dengan rob dan peninggian bangunan, serta memaksa warga berganti mata pencaharian. Ditambah lagi permasalahan struktural dalam pembangunan di pesisir menambah beban pesisir, ekstraksi air tanah, eksklusi ruang, dan sulitnya akses air bersih telah terjadi di Semarang, Demak, Pekalongan, Pemalang, Kendal, dan Brebes, Jawa Tengah. Hal demikian juga telah terjadi di Jakarta, dan Pesisir Utara Jawa Barat.

Kenaikan muka air laut telah mengancam masyarakat dari tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan ditambah proyek-proyek reklamasi yang akan menghilangkan pulau-pulau kecil seperti di Pulau Kodingareng dan Pulau Lae-Lae di Sulawesi Selatan, dan Pulau Pari di Kepulauan Seribu dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kalimantan Timur khususnya Teluk Balikpapan.

Pembiaran salah urus tata ruang terus terjadi di seluruh ruang perkotaan, pedesaan, dan wilayah pesisir pulau kecil yang semakin memperburuk krisis iklim dan ruang hidup, pengelolaan sampah yang buruk, udara yang kotor, banjir hingga pencemaran air sungai oleh limbah-limbah industri, dan air lindi dari sampah organik menyebabkan semakin turunnya kualitas air sungai sangat berpengaruh pada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan petambak ikan air tawar.

Deforestasi dan perubahan status kawasan hutan Kalimantan dengan alih alih energi terbarukan dan kebutuhan pangan juga terus memperburuk fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air dan penyerap karbon. Imbasnya Kalimantan tidak lagi menjadi Paru Paru Dunia.

Pertemuan elit COP hanya menjadi forum permufakatan jahat untuk melanggengkan pengrusakan lingkungan, pembiaran produksi emisi karbon, pencetusan ide-ide solusi palsu/greenwashing dan pengelabuan mekanisme pasar yang “berkelanjutan” untuk melegitimasi bahwa merusak lingkungan adalah keharusan sehingga fungsi lingkungan hidup terus menerus dikebiri hanya dinilai dengan angka yang menghilangkan banyak fungsi sosial dan kebudayaan. Begitu pula dengan UU No 16 Tahun 2016 hanya menjadi formalitas belaka. Karena faktanya dengan adanya permasalahan yang ada, mulai dari kenaikan suhu bumi dan kerusakan lingkungan memperlihatkan bahwa komitmen tersebut hanya omong kosong belaka.

ISI

Kami, perwakilan orang muda dari 8 provinsi meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan telah berkumpul dalam National Youth Summit pada tanggal 21-23 November 2024 di Semarang. Perkumpulan orang muda ini sebagai wujud mengkonsolidasikan kelompok orang muda untuk mendeklarasikan

penolakan/perlawanan terhadap upaya pengrusakan lingkungan hidup serta mendorong aksi iklim yang berkeadilan dalam penyelamatan pesisir dan ruang hidup rakyat. Mendorong inisiatif orang muda untuk menjaga keberlanjutan gerakan lingkungan hidup melalui gerakan-gerakan pendidikan kritis serta meneguhkan posisi orang muda sebagai kekuatan kolektif di Indonesia dalam mendorong aksi iklim yang berkeadilan. Karena saat ini orang muda dibebani dengan berbagai macam krisis ekologis yang berdampak terhadap krisis sosial, hilangnya hak atas tanah untuk ruang pangan, mewujudkan hilangnya keadilan untuk antar generasi

Kami merasakan dan mengalami bencana ekologis akibat akumulasi krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari. Kami orang muda yang tinggal di wilayah pesisir selalu di terjang banjir rob, abrasi, reklamasi, hingga potensi ancaman akibat penjualan pasir laut. Selain itu, kami merasakan permukaan air laut yang naik sehingga mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil bahkan menurunnya hasil tangkapan nelayan.

Wilayah perkotaan sering dilanda banjir dan panas yang ekstrim, polusi udara semakin meningkat, sulitnya akses air bersih serta maraknya perebutan ruang hidup. Wilayah desa mengalami kekeringan, longsor, krisis air karena privatisasi air, banjir, dan suhu pun meningkat. Masyarakat desa mengalami dinamika pola mata pencaharian yang tidak sesuai dengan keahliannya serta petani acap kali mengalami gagal panen. Kemudian wilayah hutan juga sama mengalami bencana ekologis dan krisis iklim berupa kebakaran hutan yang mengakibatkan longsor, masifnya ahli fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya pepohonan sebagai daerah resapan sehingga mengakibatkan banjir bandang dan hilangnya keanekaragaman hayati. Belum lagi masyarakat adat yang terpinggirkan/tergusur akibat kebijakan pemerintah.

Dari segala bentuk bencana ekologis dan krisis iklim tentunya secara Interseksionalitas dapat dilihat siapa yang paling terdampak, yang mengalami ketimpangan serta yang mengalami ketidakadilan. Masyarakat pulau pari yang terancam tenggelam dengan berkurangnya luasan wilayah sebesar 11% dari 42 hektar menjadi 41,4 hektar yang tersisa. Petani, nelayan, dan tambak garam di sepanjang utara Jawa Barat dirugikan karena musim dan banjir rob yang menerjang. Masyarakat Desa Bedono Kabupaten Demak yang kehilangan 3 dusun dari 7 dusun. Penurunan muka tanah di Semarang juga terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dan privatisasi air. Nelayan di daerah Muncar Banyuwangi merasakan hasil tangkapan ikan muncar dari tahun ke tahun kian menipis dan hasilnya nelayan pun mengalami kerugian, pantai-pantai di Bali dari baratnya di Pantai Pebuahan dan Pantai Kuta serta di timurnya sepanjang Garis Pantai Kabupaten Gianyar sampai Klungkung terancam hilang karena abrasi parah menggerus bibir pantai ke daratan sebesar puluhan hektar, hingga mangrove dan sempadan pantai yang terancam proyek-proyek perusak lingkungan.

Selanjutnya terumbu karang wilayah Spermode rusak terdampak reklamasi pembangunan CPI dan penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan (*Copong*) di Pulau Kodingareng untuk kebutuhan timbunan reklamasi Pelabuhan Makassar New Port. Sementara, di Teluk Balikpapan mengalami keterancaman hilangnya ruang tangkap nelayan dan tersingkirnya masyarakat adat akibat dari mega proyek yang dipaksakan yaitu pembangunan ibu kota negara baru. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan identitas seseorang meliputi gender, status sosial, adat, status ekonomi, etnis, ras, abilitas atau disabilitas, pilihan politik, kewilayahan, kepercayaan, dan kewarganegaraan.

KEKUATAN ORANG MUDA INDONESIA_PEDULI IKLIM DALAM MELAWAN PENDIDIHAN BUMI AKIBAT KRISIS IKLIM

Menumbuhkan kepedulian dan kesadaran bersama yang terorganisir dan terdidik.

VISI ORANG MUDA INDONESIA PEDULI IKLIM

Menjadi pelopor suara orang muda yang berani memberi perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk keadilan dan berkelanjutan antar generasi.

MISI ORANG MUDA INDONESIA PEDULI IKLIM

Mendorong pendidikan kritis dan kolektif sehingga lahir advokasi untuk terjadinya gerakan bersama masyarakat akar rumput yang terdampak dan tercerabut hak ruang hidupnya.

DEKLARASI ORANG MUDA MENUNTUT PENANGANAN KRISIS IKLIM

Perkumpulan National Youth Summit 2024 telah menghasilkan point-point kesepakatan yang kami sebut sebagai **Orang Muda Indonesia Peduli Iklim** merupakan tuntutan anak muda dari 8 provinsi kepada pemerintah dengan kami orang muda indonesia menuntut:

1. Cabut PP NO.26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut
2. Dorong perlindungan atau penetapan status lindung wilayah ekosistem
3. Sahkan RUU Keadilan Iklim
4. Cabut Regulasi OSS yang mengakomodir proyek Perusak Pesisir dan Laut
5. Dorong kebijakan untuk penguatan kawasan guna pencegahan bencana banjir rob
6. Stop pemakaian energi kotor beralih ke energi bersih yang berkeadilan
7. Segera restorasi ekosistem Mangrove yang rusak
8. Sahkan RUU Masyarakat Adat
9. Dorong reforma agraria, pesisir, dan pulau-pulau kecil
10. Jadikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai subyek pembangunan
11. Cabut semua perizinan yang berkaitan dengan PSN, mega proyek ekstraktif, dan reklamasi di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
